



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM

UNIT KERJA : ANGGOTA BIDANG PENGUSAHAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HADJAD WIDAGDO
2. Jabatan : DIREKTUR RESTRUKTURISASI
3. NHK : 796215

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 6.030.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 174 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 720.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 274 m2/700 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 1.850.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 243 m2/500 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 1.850.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
5. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
6. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000
7. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , WARISAN Rp. 80.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 110.000.000

1. MOBIL, TOYOTA WISH Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	390.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	6.530.000.000
III. HUTANG	Rp.	900.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.630.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.